

NETWORK GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN IPM PEREMPUAN

DI KABUPATEN WONOGIRI

Risky Shinta Rossilawati, Retna Hanani, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>

email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

One of the benchmarks for human development can be seen from the HDI. In the last 5 years, the HDI for Wonogiri regency shows that the HDI for women has lagged behind the HDI for men. Starting from these problems, the Government of Wonogiri Regency is trying to increase the HDI for women by involving multi-sectoral actors. The involvement of multi-sectoral actors raises complex relationships between actors which are then theoretically referred to as network governance. This study aims to analyze the process of network governance whether it has been implemented optimally or not by actors, as well as to analyze the driving factors for the formation of network governance. This study uses network governance theory from Klijn & Koppenjan with 4 indicators of analysis, namely Actor, Interdependency and Frames, network management, institutional features and Interaction & Complexity: output. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews and literature study. The results of the study show that the network governance process in an effort to increase the HDI of women in Wonogiri Regency has not been implemented optimally. Actor, Interdependency and Frames and network management indicators have been implemented by actors, but institutional features and Interaction & Complexity: output has not been maximized by actors. In addition, the driving factor for the formation of network governance is the actor's own internal motivation to seek to increase the HDI of women. The advice given in this study is that actors can make regulations governing the sustainability of the network, network long-term planning, and the need for programs that are integrated in all dimensions of HDI.

Keywords : Network Governance, Equitable Development, Increased HDI Women.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia sama pentingnya bagi suatu negara. Negara tidak dapat

mewujudkan pembangunan infrastruktur tanpa adanya SDM yang kompeten, sehingga pembangunan SDM dan infrastruktur harus berjalan secara beriringan. Keberhasilan pembangunan

SDM di Indonesia dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Perhitungan IPM menurut UNDP mencakup perhitungan dari 3 dimensi penyusun yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi (BPS, 2021).

Capaian IPM Indonesia dalam lima tahun terakhir relatif stabil dan menunjukkan tren perbaikan, akan tetapi setelah dikategorikan dalam jenis kelamin masih terdapat gap kesenjangan. Ketimpangan IPM laki-laki dan perempuan juga terjadi di tingkat daerah salah satunya di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Di tengah gencarnya iklim pembangunan manusia di Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian khusus. IPM Kab. Wonogiri masih peringkat 20 dari 35 Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah data IPM Kabupaten Wonogiri lima tahun terakhir.

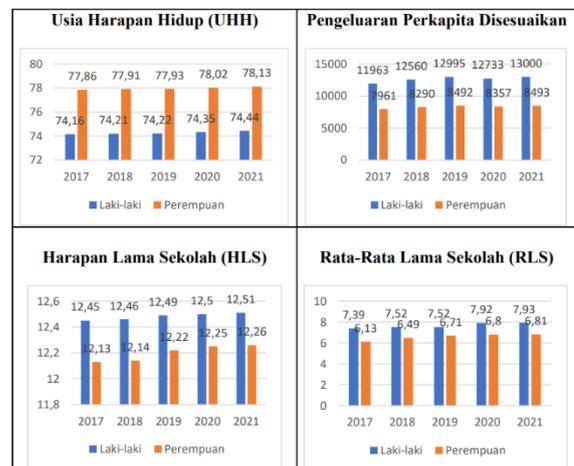
Tabel 1. 1 IPM Kabupaten Wonogiri menurut jenis kelamin Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
2017	73.08	66.28
2018	73.77	67.23
2019	74.26	67.88
2020	74.55	67.90
2021	74.82	68.14

sumber : BPS Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri secara jelas juga memiliki gap kesenjangan antara IPM laki-laki dan perempuan. Kondisi ini merepresentasikan masih belum sama kualitas hidup perempuan dan laki-laki, kondisi tersebut dapat dianalisa melalui data 4 indikator IPM berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Gambar 1.1 Indikator IPM Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021



sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Dari keempat indikator IPM diatas, tiga dari empat indikator tersebut perempuan masih dibawah laki-laki, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Indikator Usia Harapan hidup (UHH) perempuan lebih tinggi dari laki-laki yang artinya perempuan di kabupaten wonogiri memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan laki laki akan tetapi, ketiga indikator lainnya menunjukkan kondisi sebaliknya. Gap paling jauh yaitu dari ekonomi, hal ini menunjukkan

kemampuan kegiatan ekonomi perempuan masih belum setara dengan laki-laki.

Berdasarkan pada problematika diatas, Pemerintah kabupaten wonogiri mengupayakan peningkatan IPM perempuan terlebih lagi Kabupaten Wonogiri memiliki target IPM 72,45% di tahun 2023. Dalam mengupayakan peningkatan IPM khususnya IPM perempuan sejauh ini para aktor sudah melakukan serangkaian interaksi salah satunya rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada 18 Januari 2023 dan rapat koordinasi persiapan penyusunan Analisis IPM Kabupaten Wonogiri tahun 2023 yang dilaksanakan pada 28 Maret 2023. Serangkaian interaksi aktor multi sektoral yang berulang tersebut memunculkan hubungan yang kompleks antar aktor, pertukaran sumber daya dan negosiasi yang kemudian secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan atau *network governance*.

Network governance adalah fenomena relasi yang terjadi antar aktor dalam governance yang horizontal (Pratikno, 2008). Aktor dalam governance yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat dan privat. Aktor yang dimaksud adalah aktor yang membidangi IPM yaitu organisasi perangkat daerah

(OPD) terkait. Umur harapan hidup saat lahir (UHH) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan oleh BAPPEDA bidang ekonomi Kabupaten Wonogiri. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai aktor utama dalam urusan pemberdayaan perempuan, kemudian sebagai aktor sentris dalam urusan IPM yaitu BAPPEDA Kabupaten Wonogiri sebagai koordinator pembangunan daerah yang memiliki fungsi sebagai koordinator kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan IPM perempuan menjadi tujuan bersama yang harus diwujudkan melalui perpanjangan tangan dari OPD pengampu masing-masing indikator IPM dan tidak menutup kemungkinan bagi swasta dan masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam menyelesaikan masalah publik tersebut.

Pendekatan *network governance* dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana upaya peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri dalam perspektif jejaring pemerintahan seperti mekanisme koordinasi, pertukaran sumberdaya, distribusi tugas, interaksi dan

outcome yang dihasilkan dalam mencapai tujuan bersama dan dalam penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada bagaimana aktor pemerintah dalam *network governance* untuk melihat sejauh mana aktor pemerintah di Kabupaten Wonogiri sudah mengupayakan peningkatan IPM Perempuan. Secara teoritis, *network governance* melihat bagaimana hubungan dan sumber daya para aktor secara efektif dikelola pengaturan organisasional dan atau interorganisasional (Nahrawi & Ibrahim, 2021). Melihat kondisi IPM kabupaten Wonogiri yang masih ada ketimpangan tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana proses dari *network governance* di kabupaten wonogiri. Sehingga analisa menggunakan pendekatan model *Network governance* diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses *Network governance* yang dilakukan Kabupaten Wonogiri dan faktor yang mendukung terbentuknya *network governance* dan penghambat upaya peningkatan IPM di Kabupaten Wonogiri. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *Network Governance* dalam Peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri ?
2. Apa saja faktor terbentuknya proses *network governance* dan faktor penghambat proses *network*

governance dalam upaya peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri?

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chandler dan Plano, 2008 mendefinisikan administrasi publik sebagai adalah proses mengorganisir dan mengkoordinasi sumber daya dan personel publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, (Ginting, 2021). Pergeseran paradigma administrasi publik tentunya membawa perubahan terlebih pada pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi, hubungan dan interaksi dalam politisi, masyarakat dan sektor privat. Tentunya hal ini berdampak pada beragamnya corak penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah negara, dalam maksud bagaimana administrasi publik pada sebuah negara dapat beradaptasi dengan perkembangan paradigma dan kompleksitas kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan masyarakat terbagi menjadi 2 fokus, yaitu kebijakan publik dan manajemen publik.

Manajemen Publik

Hyde dan Shafritz (dalam Pasolong, 2008:96), mengemukakan

Manajemen publik adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dari administrator publik dalam membentuk pelayanan pemerintah. Shafritz menjelaskan lebih rinci terkait tugas manajer publik dalam Manajemen publik yaitu pada pengelolaan SDM sektor publik, pengetahuan dan kemampuan manajerial yang dapat memberi inovasi pada program dan kebijakan menjadi aksi nyata.

Governance

Dwiyanto (2008:22 dalam Kismartini et al., 2019) memahami konsep governance sebagai keterlibatan aktor-aktor selain pemerintah dalam upaya pemecahan permasalahan publik. Chema dalam Keban, memahami governance sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Pergeseran konsep *government* menuju *governance*, menurunkan sebuah paradigma baru dalam administrasi publik yaitu *New Public Governance*. Paradigma *New Public Governance* adalah pembaharuan pola komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. *NPG* menekankan bahwa aktor pemerintah tidak lagi mendominasi

pelaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, karena kebutuhan masyarakat yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Fenomena ini mendorong pemerintah kolaboratif dalam pengelolaan negara, dengan melibatkan swasta dan Masyarakat. Fokus utama dari pendekatan governance adalah sinergisasi dari kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, (Tjokroamidjojo, 2000).

Osborne menyebutkan bahwa, *New Public Governance* dibagi menjadi 5 (Osborne, 2010:6-7) sebagai berikut :

- a. *Socio political governance*,
- b. *Public policy governance*,
- c. *Admlnlstratif governance*,
- d. *Contract governance*,
- e. *Network governance*,

Network Governance

Pratikno (2008) menerangkan bahwa teori *network governance* berawal dari fenomena relasi antar aktor dalam governance yang horizontal. Aktor memiliki ketergantungan satu sama lain atau *interdependency*. Teori *network governance* pertama kali dipaparkan oleh Keith G Provan dan Patrick Kennis yang memfokuskan interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi dari institusi dan struktur yang berwenang untuk

bekerjasama dalam mengalokasikan sumberdaya dalam jaringan. Keith G Provan dan Patrick Kennis dalam teorinya memfokuskan pada tiga indikator utama yaitu jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor dan tujuan *network governance* (Provan & Kennis, 2015).

Klijn dan Koppenjan mengembangkan kembali teori *network governance* yang sebelumnya dipaparkan oleh Keith G Provan & Patrick Kennis. Network governance dipahami sebagai sebuah strategi yang dilakukan aktor-aktor yang mempengaruhi proses interaksi dan dapat berupa aksi kolektif dalam usaha menghasilkan outcome berupa solusi, kebijakan maupun layanan. (Klijn&Koppenjan, 2016 dalam Nahrawi & Ibrahim, 2021).

Klijn dan Koppenjan, 2016 menyebutkan bahwa teori *network governance* berhubungan dengan kompleksitas, ketergantungan antar lembaga dan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi, (Nahrawi & Ibrahim, 2021). Teori *network governance* Klijn dan Koppenjan ditandai dengan penggunaan konsep inti sebagai berikut :

A. *Actors, interdependency, and frames*

Pada indikator ini Klijn dan Koppenjan menerangkan bahwa

dalam membangun sebuah *network governance*, jaringan akan terdiri dari aktor yang beragam dan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang beragam. Aktor akan tetap menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing akan tetapi, pada suatu waktu apabila dibutuhkan dapat bekerja bersama dengan aktor lain dalam jaringan (Klijn & Koppenjan, 2012). Pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat dalam *network governance* sangat mungkin terjadi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Pertukaran sumberdaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam implementasi kebijakan ataupun program yang kemudian akan menimbulkan hubungan *interdependency* antar aktor.

B. *Network management*

Manajemen jaringan dibutuhkan untuk mengelola sumber daya dalam jaringan agar menciptakan output yang maksimal. Manajemen jaringan bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dan mengelola pertukaran sumber daya. Pengelolaan interaksi yang dimaksud adalah bagaimana jaringan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan yang ada untuk berinteraksi dan bernegosiasi

dalam upaya mewujudkan tujuan bersama.

C. *Institutional features*

Kompleksitas hubungan interaksi antar aktor akan memunculkan sebuah regulasi yang mengatur keberlangsungan dari network, berkaitan dengan cara aktor berperilaku, pertukaran sumber daya dan batasan dalam pelaksanaannya. Apabila sebuah network tidak memiliki regulasi dapat mengacu pada regulasi yang ada di atasnya seperti undang-undang atau regulasi lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya dalam prosesnya tidak akan keluar dari tujuan awal adanya *network governance*, sehingga tetap ada pada alur yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana peraturan yang menjadi pedoman jaringan untuk menjaga agar tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam tata kelola jaringan tetap pada kapasitas yang telah ditentukan..

D. *Interactions and complexity*

Hubungan saling ketergantungan antar aktor memiliki konsekuensi interaksi yang kompleks dan pola negosiasi dalam pemecahan masalah. Konsep *network governance* menekankan pada implementasi suatu kebijakan bukan merupakan tindakan dari satu aktor Tunggal, melainkan tindakan

dari banyak aktor. Interaksi yang kompleks nantinya akan menghasilkan sebuah output dapat berupa output berupa program atau kebijakan.

Pratikno dkk, 2007 dalam (Mahabas, 2018) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya suatu *network* yaitu :

- a. Faktor komunikasi yang efektif
- b. Kelembagaan yang jelas,
- c. Faktor kesadaran sendiri dari masing-masing aktor,
- d. Faktor kuatnya komitmen pemimpin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah perhitungan IPM yang ditetapkan UNDP untuk merepresentasikan kondisi masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan meliputi pendapatan, kesehatan dan pendidikan (BPS Indonesia, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian ditentukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan penelitian yaitu dengan Teknik *purposive sampling*. Adapun subjek penelitian yaitu Kabid

Pemerintahan dan Kesejahteraan masyarakat BAPPEDA Kab. Wonogiri, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Wonogiri, Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa tulisan, teks, narasi dan kata-kata tertulis yang mendukung proses pengkajian fenomena pada penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian iniyaitu wawancara dan studi Pustaka. Proses analisis data kualitatif dengan prosesnya yaitu penyusunan data secara sistematis dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dengan wawancara dan studi pustaka kualitatif kemudian dikelompokkan ke dalam kategori, di analisa, menyusun ke dalam pola dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini Analisis kualitas data menggunakan proses pemeriksaan data dengan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan keakuratan data atau metode triangulasi. Triangulasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Network Governance dalam Peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri

Proses *network governance* adalah sebuah aksi jejaring pemerintahan dimana para aktor berkolaborasi dan bergerak secara kolektif melalui mekanisme kerjasama antar lembaga pemerintah, aksi jejaring tersebut dilatarbelakangi karena adanya permasalahan kompleks yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga para aktor menyepakati menjadi bagian dari jaringan tersebut (Pratikno, 2008).

Teori *network governance* oleh Kljin dan Koppenjan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa bagaimana *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan mengingat nilai IPM perempuan pada lima tahun terakhir mengalami ketertinggalan dengan IPM laki-laki, analisa proses *network governance* tersebut dibahas melalui empat indikator *network governance* Kljin dan Koppenjan sebagai berikut :

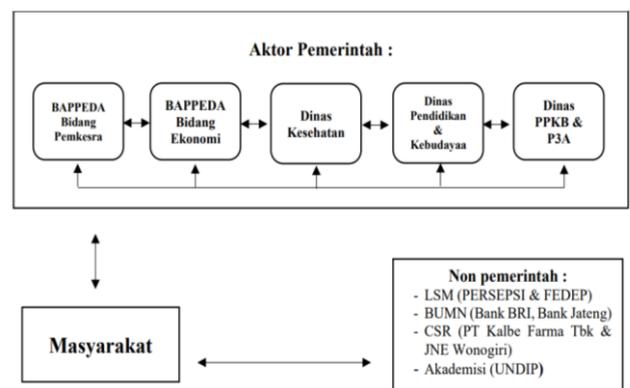
1. Actor, Interdependency and Frames

Klijn dan koppenjan dalam buku *Governance Network Theory : Past, Present and Future* menyebutkan bahwa untuk membangun sebuah *network governance* unsur pertama yang harus dipenuhi adalah aktor yang memiliki tujuan yang sama, aktor dapat terdiri dari latar belakang yang berbeda asalkan memiliki tujuan yang sama. kemudian dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa aktor nantinya akan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam mengimplementasikan program maupun kebijakan yang dihasilkan oleh *network*, namun dalam suatu waktu dapat melaksanakan aksi kolektif untuk mewujudkan tujuan *network* (Klijn & Koppenjan, 2012).

Aktor yang tergabung dalam jaringan ini terdiri dari aktor internal dan eksternal. Aktor internal bersifat aktif dan berperan dalam pengambilan keputusan, berlaku sebaliknya untuk aktor eksternal bersifat pasif, melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan *network* dan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Aktor internal tersebut adalah OPD pengampu dimensi IPM sesuai yang tertera dalam RKPD Kab. Wonogiri yang menetapkan BAPPEDA khususnya bidang Pemkesra sebagai pengampu IPM, BAPPEDA bidang Ekonomi sebagai pengampu pendapatan per kapita, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengampu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, Dinas kesehatan sebagai pengampu Angka harapan hidup dan DPPKB & DP3A sebagai pengampu IPG dan urusan pemberdayaan perempuan. Aktor yang terlibat tersebut adalah aktor yang memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan IPM perempuan. Kelima aktor telah menyepakati peningkatan IPM perempuan sebagai tujuan bersama, kemudian didukung dengan adanya arahan dari RKPD yang menetapkan kelima aktor tersebut sebagai penanggungjawab dari dimensi IPM yang menambah keterikatan kelima aktor tersebut untuk terlibat dalam *network*.

Gambar 2.1 Skema aktor dalam *network*



sumber : olahan data peneliti

Network governance dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri melibatkan aktor yang bergerak di bidang yang berbeda dan memiliki sumberdaya yang beragam. Aktor yang

multi sektoral tersebut tentunya memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang bersifat otonom. Dalam teori *network governance* aktor bertindak otonom sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing akan tetapi, dapat bekerja secara kolektif apabila dibutuhkan pada suatu waktu (Dolly & Susanti, 2022). Aksi tersebut salah satunya diwujudkan melalui pertukaran sumber daya yang menjadi karakteristik dari *network governance*.

Aktor dalam *network governance* peningkatan IPM perempuan dalam hal ini telah melakukan pertukaran sumber daya antar aktor, proses tersebut terjadi ketika aktor saling membutuhkan sumber daya yang dimiliki aktor lain, kemudian membawa aktor dalam *network governance* peningkatan IPM perempuan untuk bernegosiasi melalui rapat koordinasi. Pertukaran sumber daya telah terjadi pada ketiga dimensi IPM perempuan yaitu pertukaran sumber daya antara DPPKB & P3A dengan Bappeda Bidang Ekonomi dalam program PPEP, pertukaran sumber daya antara DPPKB & P3A dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan dalam program pencegahan pernikahan dini dan pertukaran sumber daya antara DPPKB & P3A dengan Dinas kesehatan dalam program posyandu remaja.

Pertukaran sumber daya tersebut membuat hubungan antar aktor dalam *network* menjadi semakin kompleks dan menimbulkan aktor memiliki ketergantungan atau *interdependency* kepada *network*. Klijn dan koppenjan mengasumsikan bahwa adanya hubungan saling ketergantungan antar aktor akan menentukan keberlanjutan *network*, seperti yang disampaikan Klijn dan Koppenjan sebagai berikut :

“Policy and service delivery are formed and implemented in a network of interdependent actors. Most network researchers agree that interdependency is the core factor that initiates and sustains networks.” (Klijn & Koppenjan, 2012)

Mekanisme *interdependency* dalam *network* peningkatan IPM perempuan dapat terjadi melalui proses interaksi dan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan untuk bertukar sumber daya antar aktor dalam jaringan, tentunya pertukaran sumber daya ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber daya atau keterbatasan kemampuan yang dimiliki aktor dalam mengupayakan tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya, untuk menyempurnakan aksi kolektif para aktor tersebut yaitu dengan melakukan pertukaran sumber daya.

Kemudian analisa *frames* atau kerangka pikir aktor digunakan untuk mengetahui apakah aktor sudah memahami

perannya melalui tugas dan wewenangnya dalam proses *network governance* peningkatan IPM perempuan. Aktor dalam *network governance* ini telah memahami tugas dan wewenangnya, peneliti sebelumnya telah membandingkan antara hasil wawancara dengan dasar hukum tugas & wewenang yang berlaku bagi aktor, hasilnya aktor telah memahami tugas & wewenangnya tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh informasi terkait proses *network governance* ditinjau dari indikator *actor, interdependency and frames* Sebagai berikut : Pertama, aktor telah memetakan aktor yang tergabung dalam jaringan sesuai perannya masing-masing. Aktor internal yaitu OPD pengampu dimensi IPM sesuai yang tertera dalam RKPD Kab. Wonogiri yang menetapkan BAPPEDA khususnya bidang Pemkesra sebagai pengampu IPM, BAPPEDA bidang Ekonomi sebagai pengampu pendapatan per kapita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengampu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, Dinas kesehatan sebagai pengampu Angka harapan hidup dan DPPKB & DP3A sebagai pengampu IPG dan urusan pemberdayaan perempuan, adapaun aktor eksternal yang ikut berpartisipasi namun hanya bersifat pasif dan tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan yaitu LSM,

CSR Swasta, BUMN, akademisi dan Masyarakat. Kedua, terkait pertukaran sumber daya yang menimbulkan *interdependency* dalam *network*. Pada prosesnya aktor telah melakukan hubungan pertukaran sumber daya pada setiap dimensi IPM dengan baik. Ketiga, analisa *frames* atau kerangka pikir, hasilnya kelima aktor telah memahami tugas dan wewenangnya dalam *network*. Hal ini menunjukkan bahwa *network* sudah dilaksanakan dengan baik karena aktor sudah memahami tugas dan wewenangnya sehingga output yang dihasilkan aktor akan sejalan dengan tujuan dari *network*. berdasarkan rangkaian pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari indikator *actor, interdependency and frames* aktor telah memaksimalkannya dengan baik.

2. Network Management

Manajemen jaringan yang dimaksud dalam proses *network governance* dari teori Klijn dan Koppenjan adalah bagaimana jaringan memfasilitasi interaksi, negosiasi, dan proses pertukaran sumber daya para aktor dalam mengupayakan tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan klijn & koppenjan dalam penelitiannya sebagai berikut.

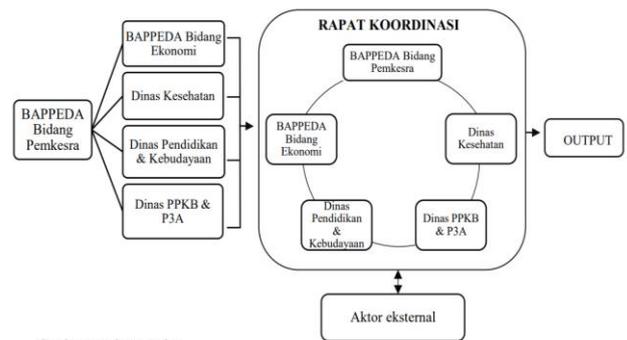
“These activities are aimed at facilitating interactions, exploring (new) content and organising interactions between actors. The horizontal nature of network management implies that it is a different activity from traditional intra-organisational management” (Klijn & Koppenjan, 2012).

Konsep *network management* yang dipaparkan Klijn dan Koppenjan menekankan pada bagaimana jaringan memfasilitasi interaksi, negosiasi, dan proses pertukaran sumber daya para aktor dalam mengupayakan tujuan bersama (Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan, n.d.). Pengelolaan *network* dalam hal ini adalah bagaimana jaringan memfasilitasi aktor untuk duduk bersama dan berdialog guna mencapai tujuan yang telah disepakati (Dolly & Susanti, 2022). Untuk dapat melihat apakah aktor melakukan pengaturan jaringan dengan baik salah satunya dengan menganalisa bagaimana manajemen jaringan yang ada dalam *network*.

Berdasarkan hasil penelitian, *network management* yang digunakan dalam *network governance* peningkatan IPM di Kabupaten Wonogiri adalah melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi membantu kelima aktor untuk mengelola interaksi, komunikasi, dan pertukaran ide antar aktor yang menghasilkan kesepakatan untuk bertukar sumber daya

dalam menghasilkan solusi permasalahan. Rapat koordinasi melibatkan kelima aktor yang memiliki kedudukan yang sama dan aktor memiliki perannya masing-masing sesuai permasalahan IPM yang menjadi bidangnya.

Gambar 2.2 skema koordinasi *network*



Sumber : analisa peneliti

Dari segi kuantitas, aktor sudah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 16 kali pertemuan terhitung dari juli 2023 sampai 28 maret 2023. Awalnya aktor melaksanakan pertemuan satu bulan sekali, kemudian tahun 2023 setidaknya aktor sudah melaksanakan 9 pertemuan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan progress yang baik dari aktor untuk mengupayakan peningkatan IPM Perempuan. Kemudian, dari segi kualitas rapat koordinasi dapat di analisa dari pokok pembahasan rapat dan outputnya. Hasilnya aktor sudah memiliki pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan *network* yaitu peningkatan IPM Perempuan. Pada sub indikator sebelumnya yaitu *actors, interdependency*

& *frames*, terdapat pembahasan yang menunjukkan aktor sudah melakukan pertukaran sumber daya lintas aktor dalam berbagai program peningkatan IPM perempuan yang dihasilkan melalui rapat koordinasi, hal tersebut menambah bukti bahwa *network management* melalui rapat koordinasi memiliki kualitas yang baik.

Proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam prosesnya aktor telah memiliki *network management* yang baik melalui rapat koordinasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi yang digunakan aktor dalam mengelola interaksi, mengelola sumber daya dan media untuk bernegosiasi. Rapat koordinasi sejauh ini sudah berjalan sebanyak 16 kali dan memiliki pokok pembahasan yang tepat sasaran dengan outputnya berupa pertukaran sumber daya dalam berbagai program peningkatan IPM perempuan, sehingga *network management* dalam proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan sudah dimaksimalkan oleh aktor.

3. *Institutional Features*

Institutional Features dalam jaringan adalah seperangkat aturan yang mengatur

bagaimana aktor memposisikan diri dalam jaringan, mendistribusikan kewenangan, dan mengatur pertukaran sumber daya dalam jaringan. Peraturan tersebut terbentuk dari proses interaksi dan pertukaran sumber daya yang terus berulang, sehingga secara bertahap memunculkan aturan yang mengatur perilaku aktor dalam jaringan. Aturan tersebut hanya dapat dibentuk dan diterima oleh aktor dalam jaringan melalui proses negosiasi yang berlangsung terus menerus, tanpa ada kekuatan kekuasaan (*centrum of power*) yang memaksakannya (Pratikno, 2008). Pengaturan interaksi aktor tersebut juga disebutkan Klijn dan Koppenjan dalam teorinya sebagai berikut :

“institutional relations also involve the emergence of rules that regulate behaviour in networks. Rules facilitate interaction in networks, thus reducing transaction costs and influencing the performance of networks” (Klijn & Koppenjan, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, proses *network governance* dalam meningkatkan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri belum terbentuk sebuah *Institutional Features* atau seperangkat aturan yang mengatur keberjalanan jaringan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kelima aktor menyebutkan bahwa aktor berpedoman pada dokumen RKPD. Perlu digaris bawahi bahwa RKPD adalah output kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah

Kabupaten Wonogiri yang melibatkan seluruh lapisan yang ada di Kabupaten Wonogiri mulai dari kepala daerah, seluruh jajaran OPD yang ada di Kabupaten Wonogiri, DPRD Kabupaten Wonogiri, civitas akademika, dan masyarakat. Dalam dokumen RKPD juga tidak termuat aturan-aturan yang mengatur keberjalanan aktor dalam jaringan, ditambah lagi bahwa RKPD berlaku untuk semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri bukan secara khusus untuk aktor dalam jaringan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selain RKPD, aktor dalam jaringan juga mengacu pada beberapa SK yaitu SK Bupati No. 441.7/200/HK/2022 tentang pembentukan tim koordinasi percepatan penurunan stunting, SK No. 950/33/HK/2022 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, SK Bupati No. 474.24/57/HK/2022 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender dan surat edaran bupati tentang arahan penyusunan anggaran responsif gender. Serangkaian SK dan surat edaran tersebut mengatur tentang pelaksanaan teknis penyelesaian masalah IPM seperti Stunting dan kemiskinan, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa perangkat kebijakan tersebut bukan hasil dari interaksi para aktor dan tidak membahas terkait bagaimana peran aktor dalam jaringan,

aturan dalam mendistribusikan kewenangan, dan mengatur pertukaran sumber daya dalam jaringan.

Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa proses *network governance* dalam upaya peningkatan IPM perempuan belum ada *institutional Features* yang menjadi dasar aturan dalam tata kelola jaringan. Meskipun para aktor menggunakan RKPD dan beberapa SK Bupati sebagai pedoman, perangkat kebijakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *institutional Features* karena bukan merupakan output dari proses interaksi para aktor dan perangkat kebijakan tersebut juga tidak mengatur bagaimana peran aktor dalam jaringan, aturan dalam mendistribusikan kewenangan, dan mengatur pertukaran sumber daya dalam jaringan. Tidak adanya *institutional Features* dikhawatirkan akan memunculkan tindakan atau kinerja yang tidak maksimal dari aktor. Hal ini dapat menjadi evaluasi dari proses *network governance* dalam upaya meningkatkan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri karena *institutional Features* adalah komponen yang penting untuk menentukan keberlanjutan dari *network governance* (Aisah, 2020).

4. Interaction & Complexcity : output

Output dari kompleksitas hubungan dan interaksi antar aktor adalah sebuah program atau kebijakan publik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan awal dari jaringan, seperti pernyataan Klijn dan Koppenjan dalam teorinya sebagai berikut :

“As a consequence of the interdependencies between actors and the variety of perceptions and strategies that they rely on, complex interaction and negotiating patterns emerge in problem solving, policy implementation and service delivery. The governance network approach stresses that outcomes of policy and public services are a consequence of the interaction of many actors rather than of the action of one single actor”
(Klijn & Koppenjan, 2012)

Klijn & Koppenjan mencirikan program atau kebijakan publik sebagai sebuah output dari *network governance*. Aktor tidak hanya melakukan interaksi sederhana melainkan “*complex interaction and negotiating*” yang dapat berupa rapat koordinasi dengan intensitas pertemuan yang tinggi sehingga peluang untuk menghasilkan program dan kebijakan akan semakin lebar.

Berdasarkan hasil wawancara, kelima aktor menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada program dan kebijakan yang dihasilkan dari proses *network governance*. Aktor dalam jaringan sejauh ini lebih berfokus pada program yang dimilikinya masing-masing dan untuk

memaksimalkan programnya aktor memanfaatkan pertukaran sumber daya antar aktor dalam jaringan. Hal yang melatarbelakangi belum adanya program dan kebijakan adalah aktor yang merasa belum memiliki kesiapan karena keterbatasan kapasitas, membutuhkan perencanaan program dan kebijakan yang matang dan tidak adanya inisiasi dari aktor untuk berinovasi. Aktor cenderung stagnan dan berpaku pada program yang mereka jalankan selama ini, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan wawancara aktor yang lebih berfokus pada program yang dimilikinya masing-masing.

Peneliti memastikan kemungkinan adanya program atau kebijakan yang sedang direncanakan oleh aktor saat ini, hasilnya 3 aktor menyatakan belum ada rencana dan 2 aktor lainnya menyatakan ada wacana untuk membuat program peningkatan IPM Perempuan yang inklusif. BAPPEDA Kabid Pemerintahan & Kesejahteraan Masyarakat dan Kabid Ekonomi & Pengembangan Wilayah memiliki kesepahaman yang sama akan adanya wacana pembuatan program dan kebijakan, akan tetapi 3 aktor lainnya menyebutkan belum ada wacana. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya kesepahaman akan wacana pembuatan program dan kebijakan, hal ini mungkin terjadi apabila belum ada koordinasi

maupun komunikasi antar aktor, terlebih lagi para aktor baru akan melakukan pertemuan kembali pada rapat koordinasi Analisis Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 28 maret 2023. Hal ini bisa menjadi evaluasi bagi *network* untuk dapat memaksimalkan rapat koordinasi sebagai sarana dalam menghasilkan sebuah output. Martinez (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *network governance* adalah wadah aktor untuk menciptakan gagasan inovatif dan mempercepat inovasi untuk menyelesaikan permasalahan publik. sehingga diharapkan aktor dalam jaringan dapat merumuskan program atau kebijakan yang dapat berdampak pada peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri, (Aisah, 2020).

Faktor Terbentuknya Proses *Network Governance* dan faktor penghambat proses *Network Governance* dalam Upaya Peningkatan IPM Perempuan Di Kabupaten Wonogiri.

Proses peningkatan IPM perempuan tentu terdapat faktor yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah *network* tersebut dan faktor yang menjadi penghambat dalam prosesnya. Pada penelitian ini akan di analisis kedua faktor tersebut untuk dapat melengkapi

pemahaman dari proses *network governance* secara utuh dan komprehensif yang dianalisa melalui teori yang ada maupun berdasarkan data riil di lapangan.

a. Faktor Terbentuknya Proses *Network Governance* dalam Upaya Peningkatan IPM Perempuan di Kab. Wonogiri.

Hal yang melatarbelakangi aktor untuk mengawali interaksi dan kerjasama adalah dari motivasi internal aktor itu sendiri. Aktor merasa memiliki rasa tanggungjawab dan tujuan yang sama dengan aktor lain terhadap peningkatan IPM Perempuan, sehingga mendorong aktor untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan aktor lain. kemudian setelah terjadi interaksi aktor melakukan pertukaran sumber daya yang menjadi karakteristik dari konsep *network governance*. Adapun hal yang melatarbelakangi pertukaran sumber daya antar aktor yaitu komitmen dari aktor untuk bersinergi bersama dalam menyelesaikan masalah, sehingga aktor membutuhkan pertukaran sumber daya tersebut untuk mempercepat proses mencapai tujuan bersama, semakin ada kolaborasi maka permasalahan akan semakin cepat dapat teratasi. Berdasarkan informasi diatas dapat

disimpulkan bahwa faktor yang mendorong terbentuknya *network governance* dalam peningkatan IPM Perempuan adalah motivasi internal aktor atau kesadaran masing-masing.

b. Faktor Penghambat Proses *Network Governance* dalam Upaya Peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri.

Proses *network governance* yang dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya menunjukkan indikator dalam prosesnya belum semua terpenuhi, hal ini secara tidak langsung menandakan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat pada pelaksanaan *network governance* yang dianalisa oleh peneliti adalah dan kurangnya inklusifitas pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam *network governance* dengan uraian pembahasan sebagai berikut :

- a. Kurangnya inisiasi untuk berinovasi dalam *network*. Berdasarkan hasil penelitian, aktor menyebutkan bahwa masih kurangnya inisiasi untuk berinovasi dalam *network*, hal ini dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi belum adanya program dan kebijakan yang dihasilkan. Aktor cenderung

berfokus pada programnya masing-masing dan dimaksimalkan melalui pertukaran sumber daya antar aktor. Belum adanya inisiasi untuk berinovasi dalam hal ini akan menjadikan tidak berkembangnya output dalam *network*. Aktor merasa belum memiliki kesiapan untuk membuat sebuah inovasi baik dari kebijakan dan program yang inklusi. Aktor menyebutkan bahwa IPM adalah masalah yang kompleks, sehingga untuk memulai sebuah inovasi baru, perumusan kebijakan dan output akan membutuhkan perencanaan serta persiapan yang matang.

- b. Kurangnya inklusifitas pemerintah dengan masyarakat dan swasta dalam *network governance*. Konsep *governance* sendiri menekankan pada pelibatan masyarakat dan swasta akan tetapi pada kasus ini kedua pihak tersebut kurang dilibatkan dalam prosesnya, sehingga keberjalanan *network governance* akan kurang maksimal. Kolaborasi dari ketiga aktor dibutuhkan meskipun pemerintah memiliki

peran dominan dalam *network governance*, dengan adanya pelibatan masyarakat dan swasta akan memberikan perspektif baru, sumber daya dan kontribusi oleh setiap aktor sehingga akan mendukung percepatan dari peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri dianalisa berdasarkan empat indikator teori *network governance* oleh Klijn dan Koppenjan bahwa proses *network governance* belum dilaksanakan dengan maksimal.

a) *Actor, Interdependency and Frames*, dalam indikator ini dijelaskan bahwa aktor telah melibatkan dan memetakan aktor sesuai dengan bidangnya masing-masing, aktor telah memahami tugas dan wewenangnya dalam peningkatan IPM perempuan dan aktor telah memaksimalkan *network* untuk melakukan pertukaran sumber daya.

b) *network management*, aktor dalam jaringan ini telah mengelola interaksi, mengelola sumber daya dan bernegosiasi melalui rapat koordinasi. Sejauh ini rapat koordinasi sudah berjalan sebanyak 16 kali dan memiliki pokok pembahasan yang tepat sasaran dengan outputnya berupa pertukaran sumber daya dalam program peningkatan IPM perempuan, sehingga *network management* dalam proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan sudah dimaksimalkan oleh aktor.

c) *institutional features*, proses *network governance* dalam upaya peningkatan IPM perempuan belum ada *institutional Features* yang menjadi dasar aturan dalam tata kelola jaringan. Aktor selama ini menggunakan RKPD dan beberapa SK Bupati sebagai pedoman. Perangkat kebijakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *institutional Features* karena bukan output dari proses interaksi para aktor dan perangkat kebijakan tersebut juga tidak mengatur bagaimana peran aktor dalam jaringan, aturan dalam mendistribusikan kewenangan, dan mengatur pertukaran sumber daya dalam jaringan.

d) *Interaction & Complexcity : output*, analisa dari indikator ini belum ada

program dan kebijakan yang dihasilkan dari proses *network governance*. Aktor dalam jaringan sejauh ini lebih berfokus pada program yang dimilikinya masing-masing dan untuk memaksimalkan programnya aktor memanfaatkan pertukaran sumber daya antar aktor dalam jaringan.

Actor, Interdependency and Frames dan *network management* sudah dilaksanakan oleh aktor, namun *institutional features* dan *Interaction & Complexcity : output* belum dimaksimalkan oleh aktor, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses *network governance* dalam upaya peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dilaksanakan secara maksimal.

Saran

Dengan demikian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

- a) Perencanaan jangka panjang *network* yang memuat perencanaan dan target capaian, agar *network* lebih terarah dan hubungan dalam *network* dapat berlangsung untuk waktu yang lama. disarankan untuk membuat perencanaan jangka panjang yang memuat rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang memuat target setiap bidang IPM perempuan dari jangka pendek sampai jangka panjang sehingga upaya

peningkatan IPM perempuan di Kab. Wonogiri lebih terarah dan dapat tercapai secara perlahan namun pasti, perlu di evaluasi bahwa dalam proses peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri aktor belum memiliki rencana strategis sehingga aktor belum memiliki acuan dalam menghasilkan outputnya. Perencanaan jangka panjang ini juga dapat digunakan untuk mengatasi dari sisi belum adanya inisiasi untuk berinovasi, dengan adanya perencanaan jangka panjang dan target yang harus dicapai maka dapat mendorong aktor untuk berinovasi dan menghasilkan output yang maksimal.

- b) Perlu adanya program yang terintegrasi pada semua dimensi IPM, seperti yang sudah dibahas dalam indikator keempat bahwa aktor dalam jaringan belum memiliki program induk yang terintegrasi dalam ketiga dimensi IPM. Program tersebut diperlukan oleh aktor agar dalam peningkatan IPM perempuan semua lini dalam IPM dapat berjalan beriringan dan lebih maksimal karena kelima aktor memiliki sumber daya yang beragam.
- c) Aktor dapat membuat regulasi yang mengatur keberlangsungan *network* terlebih dahulu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam

network belum ada regulasi yang mengatur keberjalanan *network*, sehingga tidak ada batasan-batasan yang mengatur aktor dalam bertindak, ketentuan dalam pertukaran sumber daya, aturan dalam pelaksanaan koordinasi. Apabila belum ada regulasi yang mengatur maka akan beresiko keberlangsungan *network* dalam jangka panjang dan ketidaktercapaian tujuan *network*.

DAFTAR PUSTAKA

- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: Past, present and future. *Policy and Politics*, 40(4), 587–606. <https://doi.org/10.1332/030557312X655431>
- Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan. (n.d.). *Governance Networks in the Public Sector*.
- Dolly, F. I., & Susanti, M. (2022). Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang. *Jurnal Tata Sejuta*, 8(1), 46–55.
- Ginting, F. M. R. (2021). *Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru*. [https://repository.uir.ac.id/6870/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6870/1/FAJAR MUHAMMAD RIZKY GINTING.pdf](https://repository.uir.ac.id/6870/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6870/1/FAJAR%20MUHAMMAD%20RIZKY%20GINTING.pdf)
- Hijri, Y. S., Kamil, M., Sadewo, B., & Sihidi, I. T. (2021). Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Di Kota Malang. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 7(2), 1–23.
- Nahrawi, M., & Ibrahim, A. (2021a). *NETWORK ADMINISTRATIVE ORGANIZATION DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK*. 8(8), 2538–2548.
- Pratikno. (2008). Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 12(1), 1–19.
- Sirajuddin, Saleh, S. Pd., M. P. (2016). *ANALISIS DATA KUALITATIF. Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Naufal, G., Perdana, R., Ghazlina, S. S., Pratama, R., & Prakoso, C. T. (2021). *NETWORKING GOVERNANCE DALAM PENERAPAN SMART BRANDING CITRA NIAGA KOTA SAMARINDA*(November), 76–88.
- Kapucu, N., & Beaudet, S. (2020). Network governance for collective action in implementing united nations sustainable development goals. *Administrative Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/admsci10040100>
- Sholihatin, E. (2012). Jejaring Pemerintahan di Indonesia : Kekuatan dan Kelemahan. *Jejaring Administrasi Publik*, 1(1), 29.